



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Babakan Ciparay selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Babakan Ciparay merupakan salah satu dari 30 kecamatan di kota Bandung, yang terletak di pusat kota dengan luas wilayah 287,868 hektar, dengan batas wilayah meliputi:

- 1 - Sebelah Utara : Kecamatan Andir
- 2 - Sebelah Timur : Kecamatan Bojongloa Kaler
- 3 - Sebelah Selatan : Kecamatan Kabupaten Bandung
- 4 - Sebelah Barat : Kecamatan Bandung Kulon





Secara geografis Kecamatan Babakan Ciparay memiliki bentuk wilayah datar, dengan ketinggian tanah, berada pada ketinggian 700 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Babakan Ciparay berkisar 28°C dan 24°C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan berkisar 2400 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 10 hari.

Kecamatan Babakan Ciparay mempunyai 6 kelurahan yang terdiri dari 57 RW serta 362 RT yang sebaian besar wilayah terdiri dari pemukiman dan jasa perdagangan, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.1
JUMLAH DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH RW	JUMLAH RT
1	Babakan Ciparay	138	9	57
2	Babakan	115	13	88
3	Sukahaji	94	10	89
4	Margahayu Utara	105	11	56
5	Margasuka	141	9	43
6	Cirangrang	130	5	32

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019

Kecamatan Babakan Ciparay yang terletak di tengah kota, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi terbukti dengan jumlah penduduk Kecamatan Babakan Ciparay pada Tahun 2019 sebanyak 107.542 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 63.784 jiwa dan perempuan sebanyak 36.820 jiwa, dengan jumlah 42.987 KK dan tingkat kepadatan penduduk 253/Ha.

1. Sarana dan Prasarana

Prasarana perhubungan di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay berupa jalan Negara sepanjang 6,6 Km, jalan Propinsi sepanjang 11,3 Km, jalan Kota sepanjang 22 Km, jalan arteri / penghubung sepanjang 22 Km, serta jalan/Gang sepanjang 126 Km.



a. Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada diwilayah Kecamatan Babakan Ciparay adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2

SARANA PENDIDIKAN DI KEC. KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

Sarana Pendidikan	Jumlah
a. TK	45 Buah
b. SD Negeri	32 Buah
c. SD Swasta	5 Buah
d. SLTP Negeri	5 Buah
e. SLTP Swasta	1 Buah
f. SLTA Negeri	1 Buah
g. SLTA Swasta	3 Buah
h. Madrasah Ibtidaiyah	2 Buah
i. Madrasah Tsanawiyah	1 Buah
j. Madrasah Aliyah	0 Buah
k. Perguruan Tinggi Negeri	-
l. Perguruan Tinggi Swasta	-

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019

b. Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Babakan Ciparay dapat terlihat pada tabel di bawah ini :



TABEL 1.3
SARANA KESEHATAN DI KEC. BABAKAN CIPARAY

Sarana Kesehatan	TAHUN		KETERANGAN
	2019	2019	
Sarana Kesehatan			
• Posyandu	90	90	
• Puskesmas	3	3	
• Balai Kesehatan	11	11	
• Rumah Sakit	1	1	
• Apotek	6	6	
• Dokter/Bidan Praktek	23	23	

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019

c. Bidang Kemakmuran

Dalam mendukung LPE Kota Bandung sebesar 11%, Kecamatan Babakan Ciparay telah melakukan berbagai upaya baik dengan cara mengembangkan Home Industri maupun Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah serta adanya penciptaan lapangan kerja dengan berbagai usaha antara lain :

- a. Pembuatan kerajinan tas
- b. Kerajinan boneka
- c. Pembuatan Dorokdok
- d. Pembuatan Kupat
- e. Pabrik Tahu
- f. Kerajinan cinderamata



TABEL 1.4
DATA ANGKATAN KERJA, BUKAN ANGKATAN KERJA
DAN JUMLAH PENGGANGURAN TAHUN 2019

INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KONDISI TAHUN	
		2019 (JIWA)	KET.
Penduduk Usia Kerja 15-55 tahun	1. Angkatan Kerja	35.963	
	2. Bukan Angkatan Kerja	17.762	
	3. Penduduk yang bekerja	33.450	
	4. Penganggur	1.837	

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019

d. Bidang Lingkungan Hidup

Sarana dan prasana lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Babakan Ciparay seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.5
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Taman	
	a. Luas Taman	300 m ²
	b. Banyaknya Taman	34
	c. Jalur Hijau	300 m ²
	d. Pohon pelindung/produktif	1710 buah
	e. Sumur resapan	155 buah
	Kebersihan	
	a. Lokasi TPS	5 Buah
	b. Volume Sampah	29 m ³
	c. Sarana Angkutan Sampah	51 Buah
	d. Personil Kebersihan	107 Orang
	e. Sanitasi/Saluran Got	4.500 m



e. Seni Budaya

Kegiatan dan Potensi Seni Budaya yang ada di Kecamatan Babakan Ciparay antara lain :

- a. Kelurahan Babakan ciparay : Kacapi Suling, Upacara Adat, Pencak Silat.
- b. Kelurahan sukahaji : Calung dan Jaipong
- c. Kelurahan Margahayu Utara : Calung, Seni Ibing Pencak Silat paguron Gajah Putih, dan Reog.
- d. Vokal Group.
- e. Makam Ibu Inggit Garnasih di TPU umum PORIB di Kelurahan Babakan Ciparay.

Dalam Bidang Kesenian terdapat beberapa jenis sarana yang mendukung kemajuan Kesenian Kecamatan Babakan Ciparay yaitu :

- Reog : 3 Buah
- Calung : 2 Buah
- Angklung : 1 Buah
- Kliningan : 3 Buah
- Jaipongan : 4 Buah

TABEL 1.6
POTENSI SENI BUDAYA
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

URAIAN	JUMLAH
a. Paduan Suara	2 Kelompok
b. Orkes Melayu	2 Perkumpulan
c. Kesenian Daerah	8 Perkumpulan
d. Band	2 Perkumpulan
e. Keroncong	1 Perkumpulan
f. Al Barzanzi	6 Perkumpulan



f. Bidang Olah Raga

Kegiatan dan Potensi bidang Olah Raga di Kecamatan Babakan Ciparay antara lain:

1. Gedung Futsal : 5 Buah.
2. Gedung Bulu Tangkis Indoor dan Outdoor :10 Buah.
3. Gedung Padepokan Pencak Silat : 2 Buah.
4. Lapangan Basket di setiap halaman sekolah : 4 buah
5. Bola Volley : 8 Buah
6. Tenis Meja : 40 Buah

g. Keagamaan

Berikut adalah tabel Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

TABEL 1.7.

DATA SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN

SARANA PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. Masjid /Majelis Ta'lim	101	Kegiatan Berjalan
2. Gereja	3	Kegiatan Berjalan
3. Kelenteng		
4. Vihara	-	

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Babakan Ciparay dilaksanakan forum Rapat Koordinasi/Minggon setiap hari selasa yang dihadiri oleh para Lurah dan karyawan/i serta Dinas/Instansi Kecamatan Babakan Ciparay. Kegiatan ini diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan agar dalam penyelenggaraanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu mewujudkan :



- a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu proses karena merupakan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup tradisional masyarakat Pedesaan/Perkotaan menuju masyarakat yang lebih maju dan mantap.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai metoda, karena memperhatikan cara pembangunan yang mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai suatu program, karena dilihat dari semua kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di setiap Kelurahan dengan terselenggarakannya peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan berkoordinasi dengan para Kepala Sekolah yang ada di lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay agar para siswa yang tidak mampu tetapi masih ingin melanjutkan pendidikannya dapat terus bersekolah, meningkatnya daya tampung siswa pendidikan menengah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Wajib Pendidikan menengah 12 (dua belas tahun Tahun di kalangan masyarakat Kelurahan serta meningkatkan kegiatan pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan antara lain kepramukaan, latihan keterampilan dan kejar usaha dan sebagainya.
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang berhubungan dengan perekonomian yang meliputi antara lain :
- a. Perdagangan
Perdagangan sebagai hasil produksi makin berdayaguna sebagai akibat baiknya sarana, prasarana, dan pemasaran hasil produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu dengan adanya program-program bantuan Pemerintah dalam hal pengembangan Usaha-Usaha Kecil terutama untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga yaitu dengan adanya UPPKS, UBK, UP2K, PPUD, Bawaku Makmur, PNPM, P2KB.



b. Koperasi

Kegiatan koperasi sangat membantu dalam perekonomian masyarakat Kelurahan dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) semakin meningkat disertai dengan peningkatan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti adanya pendidikan dan latihan serta penyegaran kembali bagi pengelola UED-SP, disamping itu adanya disiplin yang baik antara pengelola dengan anggota, sehingga UED-SP semakin bertambah dan modal yang di gulirkan semakin besar serta kegiatan berjalan semakin lancar. Disamping kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), juga adanya program pemerintah yaitu Modal Usaha Bergulir Remaja (MUBR) yang diperuntukan khusus untuk para remaja yang mempunyai usaha atau keinginan untuk membuka usaha, dimana mereka kekurangan serta membutuhkan modal untuk memajukan serta memulai usahanya. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih mengefektifkan pembinaan dan pengembangan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan masyarakat dengan pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketentraman di lingkungan penduduk dalam upaya meningkatkan kesadaran Bela Negara masyarakat makin meningkat dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungannya, meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Keamanan/Limnas sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu dengan adanya Siskamling Swakarsa di tingkat RT dan RW, sehingga pelaksanaan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban semakin mantap dan kekuatan rakyat terlatih serta terorganisir semakin terciptanya keamanan dan ketertiban dapat menunjang kelancaran pembangunan di segala aspek.

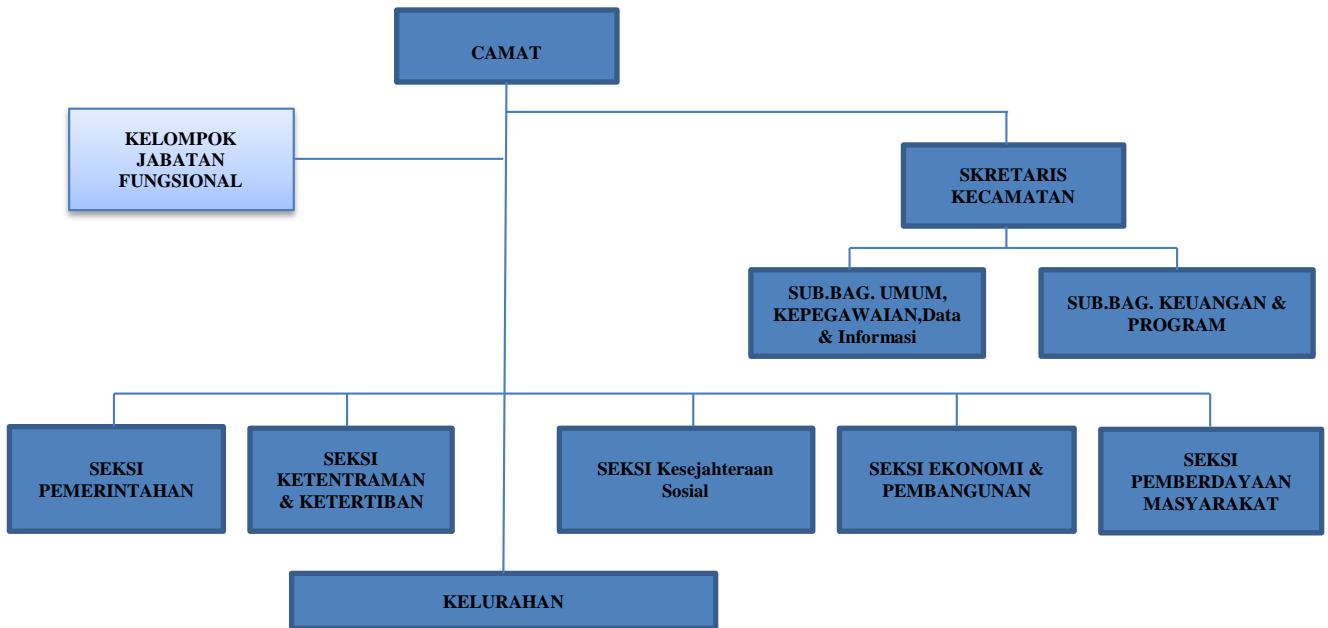
1.3 Tugas dan Fungsi

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan



Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Bandung



Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dengan eselon III-A, dengan membawahi:

1. Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesejahteraan Sosial.
3. 6 (enam) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu :: Lurah Babakan ciparay, Babakan, sukahaji, Margahayu utara, Margasuka, Cirangrang

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2019 di Kecamatan Babakan Ciparay, adalah sebagai berikut :



NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PERSONIL	ESELON				Fungsional Umum	JML
			IVB	IVA	IIIB	IIIA		
1	KECAMATAN	18	2	5	1	1	9	
2	KEL. BABAKANCIPARAY	10	4	1			5	
3	KEL. BABAKAN	6	4	1			1	
4	KEL. SUKAHAJI	8	4	1			3	
5	KEL. MARGAHAYU UTARA	7	4	1			2	
6	KEL. MARGASUKA	7	4	1			2	
7	KEL. CIRANGRANG	7	4	1			2	
	J U M L A H	63	26	11	1	1	24	

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019.

Keadaan pegawai pada bulan Desember 2019 di Kecamatan Babakan Ciparay berdasarkan Golongan dan Tingkat pendidikan, adalah sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	JM L	S D	S M P	S M A	D P L	S1	S2	JM L
1	KECAMATAN	0	7	8	3	18	0	0	6	2	6	4	18
2	KEL. Bbk ciparay	0	2	8	0	10	0	0	4	0	6	0	10
3	KEL. Babakan	0	1	5	0	6	0	0	2	0	4	0	6
4	KEL. Sukahaji	0	1	7	0	8	0	0	2	0	6	0	8
5	KEL. Margahayu utara	0	1	6	0	7	0	0	3	0	3	1	7
6	KEL. Margasuka	0	2	4	1	7	0	0	3	1	2	1	7
7	KEL. Cirangrang	0	1	6	0	7	0	0	1	0	5	1	7
	J U M L A H	0	15	44	4	63	1	0	21	3	32	7	63

Sumber : Kecamatan Babakan Ciparay, Tahun 2019.



Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Tupoksi SKPD Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

b. Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Adapun rincian tugas-pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural yang ada di Kecamatan Babakan Ciparay, adalah sebagai berikut :

1. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Camat mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.

2. Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan, pengelolaan



- perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

4. Sub bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;



- e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;



- d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- e. menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- f. menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- g. menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- n. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Ekonomi, Pembangunan

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
 - f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

9. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerjadan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerjadan pengembangan karier bawahan lingkup



Kesejahteraan Sosial;

- e. menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
- f. menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
- g. menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- i. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- j. melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- k. mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- l. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- m. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- n. menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencanadan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- o. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- p. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah



pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tahun 2014 - 2019 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.



Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan



tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam rangka mewujudkan good governance, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk



penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.



1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategical issue*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikstisar Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah reuiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).



- B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Babakan Ciparay Kota Bandung Nomor 050/213-Kec.Bacip Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses



penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah :

Kecamatan Babakan Ciparay AKURAT (Aman, berKualitas, Rapih, dan Tuntas) dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah :

1. **Aman**, diharapkan terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan bagi aparat maupun masyarakat sehingga tercipta wilayah Kecamatan Babakan Ciparay yang kondusif.
2. **Berkualias** diharapkan Aparatur Kecamatan dapat dipercaya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta hasil yang baik yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.



3. **Rapih** diharapkan Kecamatan Babakan Ciparay dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat terarah dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. **Tuntas**, diharapkan Aparatur Kecamatan Babakan Ciparay Cepat menanggapi dan bertindak dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat;

Arah dari visi tersebut, adalah Rasa Kagum dan Sungkan karena prestasi yang dimiliki oleh warga masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay dalam mewujudkan agenda pembangunan Kota Bandung, hal ini dapat mendukung terhadap terwujudnya Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera dan Agamis.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung merumuskan dari 2 misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.** Makna yang terkandung adalah untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. **Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan.** Makna yang terkandung adalah Meningkatkan kinerja pemerintahan



Kecamatan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2016.

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2018 - 2023.



Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bapplitbang Kota Bandung

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
sebelum reviu dan setelah reviu

NO	TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVIU					SETELAH REVIU							
			INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,50	81,00	81,50	81,80	82
									2. Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	%	100	100	100	100	100
		2. Meningkatnya Peran Kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	2. Persentase Kelurahan Unggul						Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	25	100	100	100	100



2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	C C	C C	B	B	A	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	78,5	79	80	82	82,5
---	--	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	------	----	----	----	------



1.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Babakan Ciparay Kota Bandung Nomor : 050/Kep.015-Kec.Bacip tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Bersamaan dengan revisi rencana strategis Kecamatan juga dilakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Ada tiga indikator kinerja yang dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama antara lain :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD di Kecamatan.

Uraian Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil sebelum dan setelah Revisi beserta penjelasannya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.



Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil REVISI
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai	Merupakan IKU/PK dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey kepuasan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Sekretariat kec, BPK, Inspektorat	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul	Kecamatan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12



	dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan		jenis kondisi di bawah ini : <ol style="list-style-type: none">1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)<ul style="list-style-type: none">- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)<ul style="list-style-type: none">- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial
--	--	--	--	--	--	--



								<ul style="list-style-type: none">- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku ≥ 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none">- petunjuk arah ke masjid
--	--	--	--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
Jl. Babakan Ciparay No 212 Bandung

								<ul style="list-style-type: none">- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Data terpilah
--	--	--	--	--	--	--	--	---



							<ul style="list-style-type: none">- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



								<ul style="list-style-type: none">- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih \geq 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none">- Anggota Koperasi \geq 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat
--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>Anggota, Pengurus Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang
--	--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p> <p>f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART
--	--	--	--	--	--	--	---



3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	Kelurahan	<p>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :</p> <p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang
---	--------------------------------------	---	---	--	---	-----------	---



							<p>mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</p> <p>Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>RW (Format B dan C)</p> <p>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</p> <p>16. RW berdaya</p> <p>a. Ada kepengurusan</p> <p>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</p> <p>c. Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)</p>
							<p>% LKK Unggul Kriteria LKK Aktif :</p> <p>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/</p>



							<p>agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</p> <p>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



							kegiatan dalam satu tahun
							% Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif : <ol style="list-style-type: none">1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)



1.1.3 Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2019 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2019 Sebelum dan Setelah Reviu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,50
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	78,50

Dalam mengantisipasi ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan perlu adanya progres atau perkembangan ketercapaian indikator per-



triwulan sehingga perlu dibuat KPI (Key Performance Indikator) sebagai alat ukur yang mencerminkan progres pencapaian kinerja sehingga untuk mencapai tujuannya dapat dijadikan pegangan :

Key Performance Indikator (KPI) untuk kinerja tahun 2019 sebagai berikut:



Q I				Q II				Q III				Q IV			
Indikator	Satuan	Target	Ket	Indikator	Satuan	Target	Ket	Indikator	Satuan	Target	Ket	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai		-	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai		-	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai	80,50	-	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan BABAKAN CIPARAY	Nilai	80,50	-
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	-	-	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	-	-	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	-	-	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	-
Persentase Kelurahan Unggul	%	-	-	Persentase Kelurahan Unggul	%	-	-	Persentase Kelurahan Unggul	%	-	-	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	-
Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	-	-	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	%	78,50	-



Kemasyara kat an				Kemasyara kat an				Kemasyara kat an							
Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup RW terrealisasi	Sub Ke giat an	-	-	Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup RW terrealisasi	Sub Ke giat an	147		Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup RW terrealisasi	Sub Ke giat an	218	-	Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberdaya an lingkup RW terrealisasi	Sub Ke giat an	221	-
Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup LKK terrealisasi	Sub Ke giat an	-	Lingkup PKK, Karang taruna dan LPM	Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup LKK terrealisasi	Sub Ke giat an	105	Lingkup PKK, Karang taruna dan LPM	Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberday aan lingkup LKK terrealisasi	Sub Ke giat an	154	Lingk up PKK, Karan g taruna dan LPM	Jumlah Sub Kegiatan Program Pemberdaya an lingkup LKK terrealisasi	Sub Ke giat an	159	Lingk up PKK, Karan g taruna dan LPM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Babakan Ciparay.

1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan



Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Babakan Ciparay Kota Bandung



Nomor : 090/102.1- Kec-Bacip, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Babakan Ciparay kota Bandung Nomor: 050/Kep.015-Kec.Bacip tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Babakan Ciparay
Kota Bandung
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80.50	82.53	102,52
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	50	50	100
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	78,50	92,31	117,59

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 100,00% ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 102,52, dan Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja 117,59%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 100,00% ditunjukkan pada indikator Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar 100%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau kurang dari 100 % sebanyak 0 (nol) indikator atau sebesar 0,00% sehingga capaian yang kurang dari 100% tidak ada.

1.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung



Tahun 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80.50	82.53	102,52
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	50	50	100
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	78,50	92,31	117,59

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	2 indikator
2	Sesuai Target	1 indikator
3	Tidak Mencapai Target	-

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.4

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET(>100%)		SESUAI TARGET(=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JML	%	JML	%	JML	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay	2	1	100	0	0	0	0
2.	Sasaran 1 Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	0	0	1	100	0	0
3.	Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100	0	0	0	0

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

Dari 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	1	50
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.



Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80.50	82.53	102,52	81	100

Sumber data Kecamatan Babakan Ciparay

1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,53 dari target sebesar 80,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,52 % atau melampaui target yang diperjanjikan.



Memperhatikan capaian target Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2019 sebesar 80,50% dan membandingkan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 82,53 % maka capaian sampai akhir Renstra target IKM tahun 2023 akan mendekati target yang telah ditetapkan karena selisihnya dari target Tahun 2023 adalah 0,53 point dimana masih ada 1 tahun ke depan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga untuk tahun selanjutnya agar dapat mencapai target IKM ini maka dengan meningkatkan kualitas dengan menambahkan IKM Kelurahan serta alat ukur kuesioner yang digunakan agar sesuai dengan Permenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang IKM yang terdiri dari 09 pernyataan, sedangkan pada pengukuran yang dilakukan oleh Kecamatan Babakan Ciparay tahun 2019 sudah menggunakan 09 pernyataan berdasarkan ISO, serta sudah melibatkan unsur IKM Kelurahan dalam pengukurannya. Pada akhirnya perlunya penyesuaian untuk pengukuran IKM pada tahun 2019 yang akan datang baik kriteria maupun targetnya. Akhirnya capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini secara nyata dapat menjadi cerminan tentang tingginya kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan di kantor Kecamatan Babakan Ciparay

Kondisi Ruang pelayanan dinilai sudah cukup representatif dan yang menjadi daya dukung dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat. ***Pelaksanaan hasil survey mandiri yang dilakukan terhadap Aspek Pelayanan di Kecamatan Babakan Ciparay Dilakukan pada Triwulan 3 dan 4 dan selalu memiliki nilai yang SANGAT BAIK yaitu*** sebesar 82,53 yang berada dalam Kategori Mutu SANGAT BAIK (A).

Sedangkan untuk mengetahui pencapaian sasaran ini selama 4 (empat) tahun Pelaksanaan RESNTRA, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Selama 4 Tahun
Pelaksanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	80	80,56	100,7	80	82,86	103,63	82	82,14	100,17	80,50	82,53	102,52

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" adalah sebesar **82,53** dari target sebesar **80,50** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **102,52 %**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian tahun 2019 lebih dari target akhir Resntra pada tahun 2019 yaitu sebesar **80,50** sehingga persentase kerjanya terhadap Target akhir Renstra sebesar **100,52 %**. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan di gambarkan pada tabel terpisah, karena pada tahun 2016-2018 Indikator Kinerja yang menjadi IKU adalah Indeks Kepuasan Masyarakat hanya untuk Kecamatan saja dan baru diperhitungkan rata-rata Kecamatan dan Kelurahan baru pada tahun 2016. Walaupun demikian hal tersebut dapat dibandingkan dengan melihat capaian tabel Berikut:



Tabel 3.11
Tabel Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2016-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	80,56	100,7	80,00	82,86	103,63	82,00	82,14	100,17

Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja nyata indikator **Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan pada saat hanya diperhitungkan di Kecamatan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 yang melibatkan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Babakan Ciparay masih ada kenaikan walaupun dilakukan perhitungan rata-rata IKM dari Kecamatan dan 6 Kelurahan.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Babakan Ciparay dan Kepala Seksi Pemerintahan .

Capaian Kinerja nilai IKM ini telah melampaui target minimal yang menjadi standar Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung yaitu, indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM “Baik” diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 75,00. Capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Babakan Ciparay sudah melampaui target minimal yang menjadi ukuran IKM Kota Bandung.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program-Program seperti terlihat dalam tabel berikut ini :



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay didukung oleh Program

No,	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1,	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2,	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3,	Program Peningkatan Disiplin Aparatur(program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga
4,	Program Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan	Output program beserta kegiatan didalamnya antara lain Simpul Space Kecamatan, 30 kampung Kreatif Wisata, <i>Creative District Project</i> , (termasuk pembinaan KUKM, Profil Potensi Ekonomi), Rumah Sehat, Satu Taman Satu Komunitas, Satu Kampung Satu Taman, Forum Jaga Budaya di Kelurahan, Forum RW Juara, Forum Karang Taruna Juara, Forum LPM Juara, Kampung Berkebun, Bedah Rumah Warga Miskin (termasuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Profil masalah Sosial), Rumah Sehat, Kampung Berkebun, Bike Sharing, Jum'at Bersepeda, Gerakan <i>Zero Waste Home</i> , Bank Sampah, Motor Sampah Kelurahan, Supermarket Sampah, Tempat Sampah RW/ Jalan Utama, Sejuta Biopori/ Sumur Resapan, Mesin Pencacah Sampah, Pengajuan Mobil Pembersih, Bendungan Sampah, <i>Septic Tank Communal</i> , Hemat Air dan Daur Ulang, <i>River Green Wall</i> , Gerakan Atap Hijau, Gerakan Pagar



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
Jl. Babakan Ciparay No 212 Bandung

kenyamanan lingkungan	Hijau, Gerakan Satu Rumah Satu Pohon, Gerakan Bandung <i>Green N Clean</i> , Gerakan Bandung Bersih, Jalan Caang Baranang, Media Kampanye Bandung Bebas, Banjir, Perkerasan paving Kotak, Gerakan Membangun Tanpa Menggusur di Kampung Kumuh, Kebinamargaan, Pasukan Gorong Gorong (termasuk MUSRENBANG), Penanganan Pasar Tumpah, Satpol PP Kecamatan, Forum PKL, Media Brosur Tertib PKL (termasuk operasional SATPOL PP Kecamatan, Pembinaan LINMAS, SATWANKAR) SATGASUS PKL, Balai RW/ Markas Karang Taruna, Safari Aspirasi Walikota Dengan Warga Level RW Setiap RW Setiap Minggu, Honor RW RT (termasuk pembinaan RW RT), (termasuk operasional Pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan)
------------------------------	---



**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN 2019
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY**

NO	URAIAN/JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019	PROSENTASI
		12.653.970.349	12.300.817.866	97,21%
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.463.887.953	2.437.544.160	98,93%
	Tunjangan Keluarga	273.243.495	266.625.392	97,58%
	Tunjangan Jabatan	229.113.000	224.700.000	98,07%
	Tunjangan Umum	50.411.500	49.975.000	99,13%
	Tunjangan Beras	159.711.544	158.310.120	99,12%
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	895.168	754.632	84,30%
	Pembulatan Gaji	87.855	40.213	0,00%
	Tunjangan Hari Raya	245.225.331	245.225.331	100,00%
	Gaji Ketiga Belas	241.263.612	241.263.612	100,00%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.649.016.924	7.478.737.297	97,77%
	Tambahan Penghasilan Menjelang Hari Raya	663.235.301	663.235.301	100,00%
	Tambahan Penghasilan Ketiga Belas	677.878.666	534.406.808	78,84%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.971.402.198	1.893.923.963	96,07%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.183.603	164.685.293	82,68%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.226.200	8.157.900	88,42%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor'	4.800.000	4.800.000	100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja'	53.150.000	46.965.000	88,36%
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor'	186.016.888	178.914.570	96,18%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan'	158.773.480	147.374.590	92,82%



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
Jl. Babakan Ciparay No 212 Bandung

	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor'	46.213.150	43.155.685	93,38%
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.923.434	140.086.100	98,01%
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga'	40.022.600	38.074.400	95,13%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan'	41.844.000	39.756.000	95,01%
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman'	249.604.843	243.572.000	97,58%
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	160.000.000	159.662.425	99,79%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	679.644.000	678.720.000	99,86%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.071.268.699	1.061.419.980	99,08%
	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	144.608.834	141.680.000	97,97%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor'	313.674.865	311.546.060	99,32%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	612.985.000	608.193.920	99,22%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	29.964.000	99,88%
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30.000.000	29.964.000	99,88%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.504.000	71.016.000	94,06%
	Pembinaan Kinerja Aparatur	75.504.000	71.016.000	94,06%
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2.501.020.680	2.485.943.700	99,40%
	Pemeliharaan Drainase & Kebersihan Lingkungan	2.367.488.180	2.352.898.700	99,38%
	Pemeliharaan RTH Kecamatan	29.452.500	28.985.000	98,41%
	Pengecatan Kerb bahu Jalan	104.080.000	104.060.000	99,98%
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	2.075.576.000	1.961.593.135	94,51%
	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana & prasarana lingkungan pemukiman (DAU)	1.081.733.061	981.366.595	90,72%
	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana & prasarana Transportasi (DAU)	407.489.752	400.629.940	98,32%



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
Jl. Babakan Ciparay No 212 Bandung

	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kesehatan (DAU)	574.853.184	568.596.600	98,91%
	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana & prasarana Pendidikan dan Kebudayaan (DAU)	11.500.003	11.000.000	95,65%
6	Program Peningkatan keamanan & Kenyamanan Lingkungan	1.261.889.150	1.260.001.600	99,85%
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.261.889.150	1.260.001.600	99,85%
7	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	505.450.000	499.613.250	98,85%
	Peningkatan SDM kader Kesejahteraan Sosial	505.450.000	499.613.250	98,85%
8	Program Pengadministrasian Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.744.456.000	1.731.156.000	99,24%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi & Kependudukan Kewilayahan	78.160.000	71.663.000	91,69%
	Kegiatan Pembinaan RT RW	1.666.296.000	1.659.493.000	99,59%
9	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	316.815.000	308.502.500	97,38%
	Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	316.815.000	308.502.500	97,38%
10	Program Pemberdayaan KUMKM	145.826.000	141.663.000	97,15%
	Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	145.826.000	141.663.000	97,15%
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	108.898.500	101.967.500	93,64%
	Penyelenggaraan Musrebang RKPD Kewilayahan	108.898.500	101.967.500	93,64%
12	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6.554.889.275	6.164.348.613	94,04%
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	5.008.463.475	4.706.950.684	93,98%
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	555.141.653	542.670.300	97,75%
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	517.227.847	480.215.519	92,84%
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	474.056.300	434.512.110	91,66%
13	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	42.070.000	40.957.500	97,36%
	Pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)	29.700.000	28.957.500	97,50%



Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)	12.370.000	12.000.000	97,01%
Jumlah	31.059.035.851	30.052.888.607	96,76%

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung :

1. Tercukupinya anggaran untuk pembangunan
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah
2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay
3. Masih kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap apatur di kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Babakan Ciparay, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan dan penganggaran yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay lebih ditingkatkan.
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian;
4. Melaksanakan lebih banyak sosialisasi dan pembinaan kepada Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW;
5. Melakukan perencanaan Program dan Kegiatan yang dapat meningkatkan keaktifan dari Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, RT dan RW.



Sasaran 2

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Prosentase Kelurahan Unggul

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Prosentase Kelurahan Unggul	Nilai	50	50	100	50	100
Rata-rata Capaian Indikator					100		

- a. Sasaran Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari 1 indikator yaitu : Prosentase Kelurahan Unggul , Capaian kinerja nyata indikator 1 " **Prosentase Kelurahan Unggul** " adalah sebesar **50%** dari target sebesar **50%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100%**, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Sasaran 3

Meningkatnya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020	%
			Target	Realisasi		Target	
1.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Nilai	78,50	92,31	117,59	79	100
Rata-rata Capaian Indikator					117,59		



- b. Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 1 indikator yaitu : Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**" adalah sebesar **92,31** dari target sebesar **78,50** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **117,59%**, capaian ini lebih dari target yang diperjanjikan.
- d. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra dari target 78,50 maka Kecamatan Babakan Ciparay telah melampaui target capaian sebesar **117,59%**.

Tabel 3.22

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Kecamatan Babakan Ciparay Tahun 2019

NO	KELURAHAN	NILAI UNSUR TINGKAT PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (%)			
		RW JUARA	SISKAMLING AKTIF	LKK AKTIF	RATA - RATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Babakan Ciparay	88,89	88,89	100	92,59
2	Babakan	92	100	100	97,33
3	Sukahaji	90	90	90	90
4	Margahayu Utara	81,82	100	100	93,94
5	Margasuka	100	100	100	93,33
6	Cirangrang	60	100	100	86,67
RATA RATA PER UNSUR		85,45	96,48	98,33	92,31
Kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan					

Sumber data : Kelurahan se- Kecamatan Babakan Ciparay

Nilai Unsur Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari pengukuran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan.



Nilai tingkat lembaga kemasyarakatan = (% RW JUARA + % SISKAMLING AKTIF + % LKK AKTIF) dibagi 3

% RW JUARA = RW yang memenuhi kriteria (1 dari 5 pengelolaan sampah dan 5 dari 21 roadmap wali Kota) dibagi Jumlah RW di kelurahan tersebut

% SISKAMLING AKTIF = Jumlah RW yang emenuhi 5 kriteria siskamling aktif dibagi Jumlah RW di Kelurahan tersebut

% LKK AKTIF = Jumlah LKK (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang memenuhi 4 kriteria LKK Aktif dibagi 3

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan)

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Parameter	Kecamatan Babakan Ciparay	Kel. Babakan Ciparay	Kel. Babakan	Kel. Sukahaji	Kel. Margahayu Utara	Kel. Margasuka	Kel. Cirangrang	Rata - Rata
2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
rata rata hasil survey IKM se-Kecamatan	80,50	Nilai	IKM Kec. Babakan Ciparay	81,83	85,01	82,71	80,50	83,03	82,50	80,12	82,53

Dari tabel Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan grafik diatas dapat kita lihat data yang capaiannya yang tertinggi hingga capaiannya yang terendah hal ini mencerminkan bervariasi kinerja yang telah dilaksanakan kelurahan di Kecamatan Babakan Ciparay.

Data tertinggi pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Babakan Ciparay dimana 3 unsur penilaian memiliki nilai yang cukup tinggi dibanding target yang telah ditentukan sehingga dalam hal ini Kelurahan perlu mempertahankan capaian capaian yang telah diraih.

Data terendah pada tabel dan grafik diatas pada Kelurahan Cirangrang dimana dari 3 unsur penilaian yang menduduki nilai terendah pada RW Juara sehingga perlu adanya peningkatan capaian pada LKK aktif di



kelurahan Cirangrang yang datanya mencapai 86 % sehingga perlu adanya peningkatan capaiannya.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 atau tahun sebelumnya capaian Kecamatan Babakan Ciparay sebesar 80.50 mengalami peningkatan.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Babakan Ciparay didukung oleh Program :



No,	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1,	Program Pemberdayaan Masyarakat	Output Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tabel 3.3.13

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Babakan Ciparay

No,	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/ kurang)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi RW	5.008.463.475	4.706.950.684	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi PKK	555.141.653	542.670.300	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi Karang Taruna	517.227.847	480.215.519	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
		Fasilitasi LPM	474.056.300	434.512.110	Jumlah sub kegiatan inovasi	Baik
JUMLAH			6.554.889.275	6.164.348.613	Prosen : 94,04	

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Babakan Ciparay



Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Tersedianya format baku dan Sistematika yang jelas dalam penyusunan dokumen tersebut Dokumen LKIP, Renja, Renstra, laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun
2. Adanya Bimbingan teknis dan Asistensi dengan Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Bandung
3. Dibentuknya Tim Penyusunan dengan SK Camat
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Babakan Ciparay

Faktor Penghambat

1. Tidak Tersedianya Anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pada Tahun Anggaran 2019,
2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay
4. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Mengalokasikan Anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pada Tahun Anggaran kedepan,
2. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Babakan Ciparay lebih ditingkatkan.
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian



4.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 31.059.035.853,14 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 12.653.970.349,79,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 18.405.065.502,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 30.025.888.607,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 12.300.817.866,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp. 17.752.070.741,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,76%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.006.147.246,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien..

Sedangkan mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2019. Neraca Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung per 31 Desember 2019 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 22.514.077.689,00 atau naik sebesar 4,57% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 21.530.053.119,00 Nilai aset sebesar Rp. 22.514.077.689,00 tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 134.324.744,00 aset tetap Rp. 20.615.176.059,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 1.764.576.886,00 sedangkan nilai Ekuitas Dana sebesar 22.504.433.476.00.

Adapun untuk realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.26

**Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
Kecamatan Babakan Ciparay**

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2019	Tahun 2019	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
Sasaran 1				
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat				
1	Program Penunjang (Non Urusan)	3.148.174.897	3.056.323.943	97,08
2	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.744.456.000	1.731.156.000	99,24
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	2.501.020.680	2.485.943.700	99,40
4	Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)	2.075.576.000	1.961.593.135	94,51
	TOTAL	7.724.771.577	7.503.860.778	97,14
Sasaran 2				
Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan				
1	Program Peningkatan keamanan & Kenyamanan Lingkungan	1.261.889.150	1.260.001.600	99,85
2	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	505.450.000	499.613.250	98,85
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	316.815.000	308.502.500	97,38
4	Program Pemberdayaan KUMKM	145.826.000	141.663.000	97,15
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	108.898.500	101.967.500	93,64
	TOTAL	2.338.878.650	2.311.747.850	98,84
Sasaran 3				
Meningkatnya tingkat pemberdayaan masyarakat				
1	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6.148.293.941	5.950.396.258	96,78
2	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	42.070.000	40.957.500	97,36
	TOTAL	6.596.959.275	6.205.306.113	94,06
	TOTAL	18.405.065.502	17.752.070.741	96,45



Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6
	BELANJA	31.059.035.853,14	30.052.888.607,00	96,76
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.300.817.866,00	12.653.970.349,79	97,21
	BELANJA LANGSUNG	18.405.065.502,00	17.752.070.741,00	96,45

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi se-Kecamatan Kecamatan Babakan Ciparay mencapai **96,76%**. Hal ini dinilai sangat baik karena dalam pelaksanaan penganggaran realisasi anggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Adapun pada belanja-belanja yang realisasinya tidak mencapai 100% dikarenakan ada kelebihan penganggaran seperti pada belanja tidak langsung, yaitu gaji dan tunjangan. Ada pegawai yang mutasi, pensiun, dan sebagainya yang mengakibatkan realisasi anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	7.724.771.577,00	7.503.860.778,00	97,14
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.338.878.650,00	2.311.747.850,00	98,84
3	Meningkatnya Tingkat pemberdayaan masyarakat	6.596.959.275,00	6.205.306.113,00	96,78
	Jumlah	18.405.065.502,00	17.752.070.741,00	96,45

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Babakan Ciparay pada tahun 2019 sebesar 91,38% Sudah maksimal, Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Babakan Ciparay per sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.38
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,		100	7.503.860.778,00	97,14
1	Melebihi/Melampaui Target	1	102,52		
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2,		100	2.311.747.850,00	98,84
1	Melebihi/Melampaui Target	-	-		
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		



B.	Sasaran 3,		100	6.205.306.113,00	96,78
1	Melebihi/Melampaui Target	1	117,59		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian sasaran kinerja.

Pencapaian Misi pada Tahun 2019 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2018-2023, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.55

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2018-2023

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-1	Selisih	% (dari Pagu Indikatif)
A.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	31.059.035.853,14	30.052.888.607,00	1.006.147.246,14	96,76

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

3.3.2 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan



oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Juara	Tahun

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	BBGRM	Kategori Kolaborasi	2019

3. Prestasi Tingkat Kota

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	Camat Terbaik	Kategori Kolaborasi	2019
2.	Eco Office	Kategori Mangement Eco Office	2019
3.	Lomba Senam GISA	Juara I	2019



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,26% atau interpretasi memuaskan
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117,59% atau interpretasi memuaskan

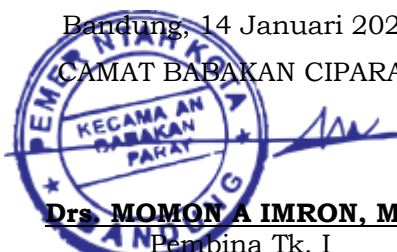
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran >100 yang termasuk dalam Interpretasi *Memuaskan*. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. **31.059.035.853,14** sedangkan



realisasi anggaran mencapai Rp. **30.052.888.607,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,76%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kondisi anggaran adalah Surplus Rp. **1.006.147.246,00**. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung adalah **96,76%** dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sudah cukup optimal tetapi masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 14 Januari 2020
CAMAT BABAKAN CIPARAY


Drs. MOMON A IMRON, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19670602 199603 1 003